



Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Membentuk Kesadaran Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Lintang Indah Meilasari³,
Shafanisa Ganefianda Rizky Suharto⁴, Angelica Alyscha Ocktaviona⁵

¹Direktur Pusat Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², lintangmel307@gmail.com³,
shafanisaaida.19@gmail.com⁴, angelockta45@gmail.com⁵

Korespondensi penulis : mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Abstract. For citizens who support democracy, ethics and human rights (HAM), civic education is an important instrument to shape their character and mentality. In the era of globalization and openness of information, the value of education which places a strong emphasis on strengthening human rights (HAM) values is very important. The design of civic awareness for theoretical approaches and literature research may actively involve the formation of citizenship, as discussed in this paper. This article examines the application of incorporating human rights (HAM) ideals into civic education instruction in educational settings using a descriptive qualitative approach. Civic education is an important instrument in shaping the character and mindset of citizens who uphold democracy, ethics and human rights (HAM). The political consequences of this research include the need for curriculum renewal, institutional support, teacher training and the idea that civic learning is a process rather than a means to achieve civic and human ideals.

Keywords: Democracy, Human Rights, Civic Education, Responsibility, Citizen

Abstrak. Instrumen penting dalam rangka pembinaan akhlak dan mentalitas warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi, akhlak mulia, dan hak asasi manusia adalah pendidikan politik. Nilai-nilai pendidikan yang mengutamakan pemajuan Hak Asasi Manusia sangat penting di era globalisasi dan kebebasan informasi. Desain kesadaran warga negara untuk pendekatan teoritis dan penelitian literatur mungkin secara aktif melibatkan pembentukan kewarganegaraan, seperti yang dibahas dalam makalah ini. Artikel ini mengkaji penerapan penggabungan cita-cita Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam instruksi PKn dalam lingkungan pendidikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendidikan Politik merupakan instrumen penting dalam rangka membentuk karakter dan pola pikir warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi, etika dan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsekuensi politik penelitian ini mencakup perlunya pembaruan kurikulum, dukungan kelembagaan, pelatihan guru dan gagasan bahwa pembelajaran warga negara adalah sebuah proses daripada sarana untuk mencapai cita-cita kewarganegaraan dan manusia.

Kata kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Tanggung Jawab, Warga Negara

1. LATAR BELAKANG

Cara yang paling efektif untuk mengajarkan orang moralitas dan tanggung jawab sosial selain kecerdasan adalah melalui pendidikan. Di antara motivasi kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, pendidikan tidak hanya diperlukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten di bidang akademik, tetapi juga membentuk kepribadian warga negara dengan kesadaran besar akan hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran strategis dalam membangun nilai-nilai demokratis, moralitas sosial dan apresiasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, semangat reformasi yang telah diterapkan sejak tahun 1998 mendorong kelahiran berbagai peraturan, di mana Hak Asasi Manusia (HAM) ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem Administrasi Negara dan sistem Pendidikan Nasional (UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003). Upaya untuk mengintegrasikan dokumen dan cita-cita Hak Asasi Manusia ke dalam program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan wujud nyata dari upaya tersebut. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk perbaikan dalam cara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah yang menggabungkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Kelas kewarganegaraan masih diajarkan di banyak sekolah sebagai latihan menghafal yang tidak ada hubungannya dengan realitas sosial siswa (Komnas HAM, 2020).

Lebih dari itu, masih sering ditemukan fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pendidikan, seperti pelecehan, diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak siswa yang terjadi di ruang belajar (UNICEF, 2014: Komnas Perlindungan Anak, 2020). Hal ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam metode pengajaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berorientasi pada pembentukan kesadaran kritis, partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial (Hoskins & Crick, 2010).

2. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperkenalkan dan mengkaji fenomena penggabungan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan pengaruhnya terhadap pembentukan kesadaran kewarganegaraan. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami makna, pengalaman dan konteks sosial yang kompleks dalam dunia pendidikan (Creswell, 2014).

Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang subjek yang sedang dibahas, peneliti dapat menggunakan tinjauan pustaka untuk melihat berbagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal dan dokumen kebijakan yang relevan. Para peneliti dapat memahami evolusi dan implementasi teori dan praktik pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di kelas kewarganegaraan sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan ini (Sugiyono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Diperlunya Pendidikan Politik yang Segera Memasukkan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pendidikan politik berfungsi sebagai instrumen taktis untuk mengajarkan siswa Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip-prinsip demokrasi (Banks, 2008; Sapriya, 2006). Pilar terpenting kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi adalah pemahaman dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan (Tilaar, 2002). Oleh karena itu, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya digunakan dalam kehidupan nyata dan relevan dengan keadaan sebenarnya daripada hanya terbatas pada teori saja ketika diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). (Hoskins dan Crick, 2010).

Dalam budaya Indonesia yang heterogen, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan instrumen penting untuk menegakkan kohesivitas dan keadilan sosial (Komnas HAM, 2020). Integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran kewarganegaraan sangatlah vital karena mengabaikan aspek-aspek hak dan kebebasan individu dapat melahirkan sikap otoriter dan intoleran (Freire, 2005). Jika nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ditanamkan sejak dini, maka risiko berkembangnya sikap diskriminatif, intoleran, bahkan anti demokrasi akan semakin besar. Oleh karena itu, dunia pendidikan memiliki tanggung jawab penting dalam mencegah hal tersebut melalui penguatan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak tingkat dasar (UNESCO, 2015). Selain itu, pengajaran Hak Asasi Manusia (HAM) menumbuhkan pemikiran kritis terhadap meluasnya ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Peserta didik yang memahami dasar-dasar Hak Asasi Manusia (HAM) idealnya memiliki kepekaan tinggi terhadap isu-isu sosial dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadapnya (UNICEF, 2014).

b. Strategi Pembelajaran PKN berbasis Hak Asasi Manusia (HAM)

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), diperlukan strategi yang sesuai. Pembentukan kesadaran nilai tidak dapat diperoleh semata-mata melalui pendekatan yang berfokus pada penghafalan teks hukum, melainkan melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai, bersifat partisipatif, serta mendorong proses reflektif (Hoskins dan Crick, 2010; Sapriya, 2006).

1. Kurikulum yang Responsif

Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar memuat materi Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit dan kontekstual. Materi seperti kebebasan

berpendapat, anti-diskriminasi, keadilan sosial dan hak anak perlu dimasukkan sebagai bagian dari capaian pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan di Indonesia memberikan ruang lebih fleksibel dalam memasukkan nilai-nilai tersebut, namun masih membutuhkan panduan teknis yang lebih terstruktur (Kemendikbudristek, 2022).

2. Metodologi Pengajaran yang Humanis

Selain itu, Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemikiran kritis mengenai meluasnya ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Menurut Hoskins dan Crick (2010), pembelajaran yang melibatkan diskusi, penelitian kasus, debat terbuka, serta simulasi peran dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih kontekstual. Dengan metode ini, siswa dapat mengalami dan memikirkan nilai-nilai tersebut dalam konteks dunia nyata selain memahami Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai ide teoritis. Alih-alih menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, guru kini berperan sebagai fasilitator percakapan yang membantu siswa berpikir kritis dan bebas sekaligus bertanggung jawab atas keyakinan mereka sendiri (Sapriya, 2006). Melalui proses ini, pembelajaran kewarganegaraan menjadi sarana penting dalam menanamkan sikap demokratis, menghargai perbedaan dan memperkuat kesadaran terhadap hak serta tanggung jawab sebagai warga negara.

3. Media dan Sumber Belajar

Pendidikan politik yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) dapat memperoleh manfaat dari penggunaan media, termasuk film, dokumenter, berita dan buku. Sumber belajar yang bersifat kontekstual mendorong peserta didik untuk mengamati secara langsung realitas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan masyarakat, sekaligus membangun empati serta meningkatkan kesadaran sosial mereka (UNESCO, 2015; UNICEF, 2014).

4. Penilaian yang Berbasis Proses dan Nilai

Penilaian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mengukur karakteristik afektif dan sikap siswa di samping pemahaman kognitif mereka. Penilaian yang dilakukan melalui tugas proyek, refleksi pribadi, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dapat menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pembelajaran yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) (Hoskins dan Crick, 2010).

c. Dampak terhadap Kesadaran dan Sikap Warga Negara

Kesadaran kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh dimasukkannya Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), terutama dalam hal mengembangkan karakter yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab pada generasi penerus (Hoskins & Crick, 2010; Banks, 2008).

1. Meningkatkan Pengetahuan Hukum

Peserta didik yang memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) umumnya lebih memiliki kesadaran terhadap aturan hukum dan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan. Mereka menyadari bahwa hukum memiliki peran untuk melindungi hak-hak setiap individu dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, bukan sebagai sarana untuk melakukan penindasan (UNESCO, 2015; Freire, 2005).

2. Mendorong Keikutsertaan Sosial dan Politik

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong terbentuknya generasi yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Mereka tidak bersikap pasif dalam menghadapi situasi, melainkan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kritik yang bersifat membangun, terlibat dalam forum-forum kewargaan, serta berperan aktif dalam pemilihan umum maupun dalam organisasi kemasyarakatan (Hoskins dan Crick, 2010; Banks, 2008).

3. Mengembangkan Tanggung Jawab Kolektif

Kesadaran hak asasi manusia (HAM) mencakup upaya untuk menegaskan hak-hak sendiri dan kesadaran akan kewajiban sosial seseorang terhadap orang lain. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan dalam membantu peserta didik menyadari pentingnya peran serta mereka dalam melindungi hak-hak orang lain serta memperkuat rasa solidaritas sosial.

4. Menumbuhkan Toleransi dan Empati

Pengajaran kurikulum pendidikan kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mempromosikan penghormatan terhadap keberagaman Pendidikan Kewarganegaraan(PKn). Hal ini memiliki makna penting dalam konteks masyarakat yang bersifat multikultural seperti Indonesia. Sikap toleran terhadap perbedaan agama, budaya, suku bangsa dan orientasi politik menjadi bekal yang esensial untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis dan damai (UNESCO, 2015; UNICEF, 2014).

d. Tantangan Solusi

Meskipun ideal, penerapan integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menghadapi tantangan yang berbeda, baik dalam hal kebijakan dan praktik di kelas di kelas.

1. Kurangnya Pemahaman Guru

Banyak guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) belum memiliki pemahaman mendalam tentang Hak Asasi Manusia (HAM) atau belum dilatih dalam metode pengajaran yang berbasis nilai. Solusinya adalah pelatihan guru secara berkelanjutan yang fokus pada penguatan kompetensi pedagogik dan nilai (Komnas HAM, 2020; Kemendikbudristek, 2022).

2. Keterbatasan Materi dan Sumber Belajar

Ketersediaan buku ajar dan modul yang mengintegrasikan Hak Asasi Manusia (HAM) masih terbatas. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan sumber belajar yang aktual dan relevan dengan realitas sosial (Komnas HAM, 2020; Kemendikbudristek, 2022).

3. Budaya Sekolah yang Tidak Demokratis

Beberapa sekolah masih mempertahankan budaya otoriter yang bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mengatasi ini, kepala sekolah dan guru perlu membangun lingkungan belajar yang demokratis, inklusif dan dialogis.

4. Kurang Dukungan Pemerintah

Meskipun Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, belum ada kebijakan pendidikan yang benar-benar memfokuskan pada integrasi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurikulum secara sistemik. Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) dalam merumuskan kebijakan Pendidikan Nasional yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) (UNESCO, 2015; Kemendikbud Ristek, 2022).

e. Studi Kasus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk merencanakan program pendidikan dan pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mahasiswa, instruktur dan pendidik. Semua konsep penting Hak Asasi Manusia (HAM) diajarkan dalam program tersebut, bersama dengan strategi

untuk mempromosikan diskusi dan metode untuk mengintegrasikan ide-ide Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kelas.

Hasil evaluasi dari program ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan signifikan dalam kemampuan analisis terhadap isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan lebih percaya diri dalam mengajarkannya di kelas. Selain itu, siswa yang mengambil bagian dalam kurikulum ini biasanya menjadi lebih terlibat dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan aksi sosial.

Metode-metode yang tercantum di atas menunjukkan bahwa memasukkan Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat efektif dan jika dilakukan dengan benar, dapat secara signifikan memengaruhi keyakinan dan tindakan siswa (Komnas HAM, 2020).

4. KESIMPULAN

Kemampuan warga negara untuk menghargai keberagaman, bertindak adil dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, serta pemahaman mereka terhadap hak dan tanggung jawab mereka, semuanya sangat dipengaruhi oleh kursus Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mereka. Cita-cita Hak Asasi Manusia (HAM) harus diintegrasikan ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di negara yang demokratis dan multikultural seperti Indonesia agar dapat menghasilkan generasi yang bertanggung jawab, mampu berpikir kritis, dan memiliki kesadaran sosial.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilakukan secara teoritis semata, melainkan harus diimplementasikan melalui strategi pembelajaran yang bersifat aktif, partisipatif dan kontekstual. Melalui pendekatan seperti diskusi, simulasi, studi kasus dan pelaksanaan proyek sosial, peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga terdorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan dalam pengintegrasian nilai-nilai ini tercermin dari berbagai praktik baik yang telah dilaksanakan oleh sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan di Indonesia.

Banyaknya kendala yang masih menghambat pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), antara lain ketidaktahuan pengajar mengenai sumber daya Hak Asasi Manusia (HAM), minimnya sumber belajar yang relevan dan kultur sekolah yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah, pendidik dan organisasi Hak Asasi Manusia

(HAM) harus bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan hukum internasional: Kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.
- Banks, J. A. (2008). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.; 30th anniversary ed.)*. Continuum. (Original work published 1970)
- Hoskins, B., & Crick, R. (2010). *Learning to participate: The role of education in developing active citizenship*. The Council of Europe.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan teknis Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan HAM*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Nasoha, A. M. M. (2013). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Sapriya. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter bangsa*. Remaja Rosdakarya.
- Siregar, L. S. M. (2024). Implementasi pendidikan hak asasi manusia melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan*. Grasindo.
- UNESCO. (2015). *Human rights education in the school systems of Asia-Pacific: A regional review*. UNESCO Bangkok.
- UNICEF. (2014). *Child rights and citizenship education: A global perspective*. UNICEF.